

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan terciptanya lapangan pekerjaan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat sehingga menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan tolak ukur dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diperhatikan upaya pengentasan kemiskinan secara komprehensif. Meningkatnya jumlah penduduk miskin akan memberikan pengaruh negatif terhadap pembangunan ekonomi (Misdawita & Sari, 2018).

Menurut BPS, seseorang yang dikatakan dalam kategori miskin jika rata-rata pengeluaran perkapita setiap bulan suatu rumah tangga berada dibawah garis kemiskinan. Pada tahun 2022, garis kemiskinan di Provinsi Jawa Timur menunjukkan pengeluaran minimum seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok sebesar Rp 460.909/bulan. Artinya ketika seseorang memiliki pengeluaran minimum sebesar Rp15.363/hari, maka seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai orang miskin. Kemiskinan juga sering disebut dengan keadaan seseorang yang kekurangan uang dan barang dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Pengeluaran seseorang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan ekonominya (Annisa & Anwar, 2021). Lalu berdasarkan Perpres No. 7 Tahun 2005 tentang RPJMN, kemiskinan ditinjau dari segi kurang mampu dalam memenuhi sandang, pangan, dan papan.

Masalah kemiskinan menjadi isu kritis secara global pada negara maju maupun negara berkembang. Penurunan kemiskinan sudah termasuk dalam tujuan pembangunan negara, sehingga diperlukan kebijakan yang menyeluruh dan teratur dalam mengatasi masalah ini (Wicaksana & Primandhana, 2023). Masalah kemiskinan pastinya juga terjadi di negara Indonesia. Sebagai negara berkembang, isu kemiskinan berkembang menjadi berbagai konsekuensi sosial maupun ekonomi. Perlu adanya kebijakan secara terus-menerus dan intensif serta keterlibatan banyak pihak dalam memerangi kemiskinan (Alvin & Hukom, 2023).

Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya memerangi isu kemiskinan. Berdasarkan BPS per bulan Maret 2022, penduduk miskin di Indonesia sudah sebesar 26,16 juta jiwa. Selanjutnya, September 2022 mengalami peningkatan sebesar 26,36 juta jiwa. Artinya upaya pemerintah belum terealisasi sepenuhnya untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia. Berikut perkembangan dari 2017-2022 mengenai penduduk miskin Pulau Jawa.

Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Jawa 2017-2022

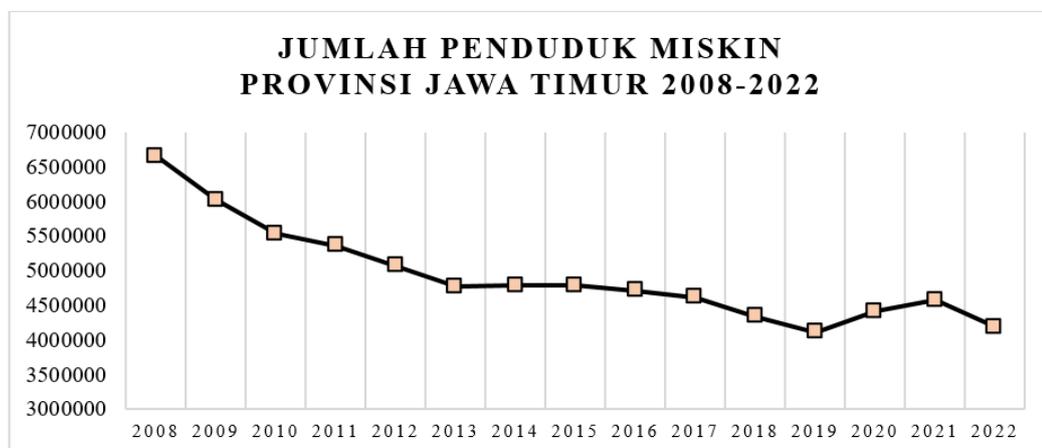


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Penduduk di Indonesia mencapai 275,77 juta jiwa di tahun 2022, sebesar 55,94% atau 154,28 juta jiwa merupakan penduduk Pulau Jawa. Penduduk di Provinsi Jawa Timur mencapai 26,67% dan 73,33% lainnya tersebar di provinsi lainnya. Dari grafik diatas, angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai terbanyak di Indonesia mencapai 4.181,29 ribu jiwa.

Proporsi kemiskinan yang terus meningkat membuat pemerintah terus berupaya dalam mengentaskan masalah tersebut. Menurut Basri (2002), untuk mengatasi kemiskinan, sangat penting untuk melakukan restrukturisasi terhadap sistem yang otoriter dan monopoli dengan strategi memperkuat posisi politik dan ekonomi bagi kelompok masyarakat miskin. Penguatan politik melibatkan revisi aturan yang semula membatasi untuk lebih memfasilitasi, sementara dalam penguatan ekonomi, fokusnya adalah mengubah struktur ekonomi yang monopoli menjadi lebih adil dan mendukung, sehingga akses kelompok masyarakat miskin terhadap sumber daya dapat ditingkatkan. Berikut adalah perkembangan penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.

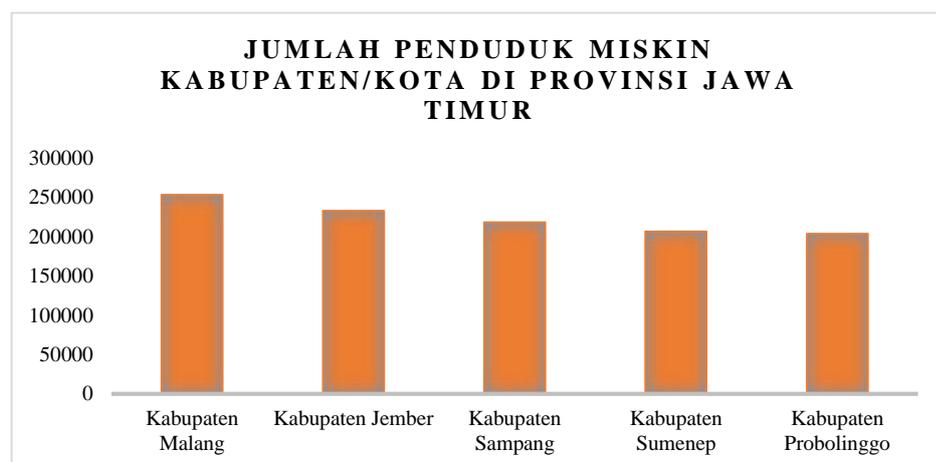
Gambar 1. 2 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur 2008-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Grafik diatas menunjukkan penduduk miskin Provinsi Jawa Timur pada periode 2008-2022 terlihat relatif menurun. Angka penduduk miskin mengalami penurunan periode 2008-2013. Pada periode 2018, penduduk miskin mencapai 4.332,59 ribu jiwa serta mengalami penurunan menjadi 4.112,25 ribu jiwa pada tahun 2019. Selanjutnya di tahun 2020 menunjukkan peningkatan sebesar 4.419,1 ribu jiwa. Hal ini dipicu masalah pandemi Covid-19 dan merubah tatanan perekonomian di dunia. Selanjutnya peningkatan jumlah penduduk miskin masih berlanjut sampai tahun 2021. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum bisa mengendalikan dampak dari adanya pandemi terhadap angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Penduduk miskin mulai turun dari 4.572,73 ribu jiwa menjadi 4.181,29 ribu jiwa pada tahun 2022. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan perekonomian di Provinsi Jawa Timur berpotensi menurunkan jumlah penduduk miskin. Selain itu, terdapat beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk miskin tertinggi pada tahun 2022, sebagai berikut.

Gambar 1. 3 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022



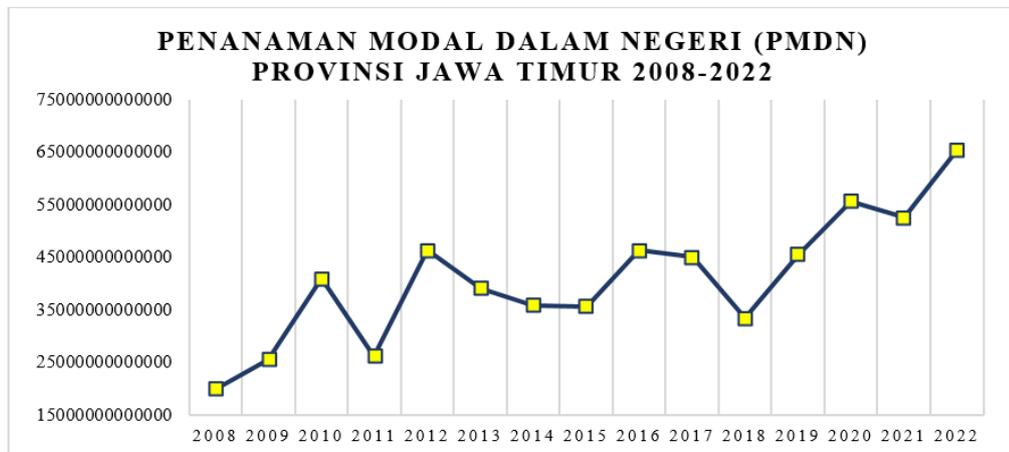
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022. Jumlah penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Malang sebesar 252.880 jiwa. Selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Jember sebesar 233.730 jiwa, Kabupaten Sampang sebesar 217.970 jiwa, Kabupaten Sumenep sebesar 206.200 jiwa, dan Kabupaten Probolinggo sebesar 203.330 jiwa.

Telah menjadi kewajiban pemerintah untuk berupaya menurunkan penduduk miskin salah satunya melalui investasi. Pemerintah terus memotivasi adanya investasi dalam negeri dan luar negeri guna membangun, membeli atau mengakuisisi perusahaan sehingga dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja. Terbukanya kesempatan kerja akan mengurangi jumlah pengangguran dan membuat banyak penduduk keluar dari garis kemiskinan (Wiganepdo & Soegoto, 2022).

Menurut Laporan Kinerja Penanaman Modal tahun 2022 menerangkan bahwa realisasi PMDN tertinggi ketiga di Indonesia adalah Provinsi Jawa Timur dengan 4.311 proyek atau sebesar 65,4 triliun rupiah. Selain itu, laju pertumbuhan PMDN pada periode 2022 diatas rata rata pertumbuhan PMDN nasional. Pada periode 2022, pertumbuhan PMDN di Provinsi Jawa Timur mencapai 24,5% dan rata-rata pertumbuhan PMDN di Indonesia sebesar 21,8%. Berikut adalah perkembangan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Jawa Timur.

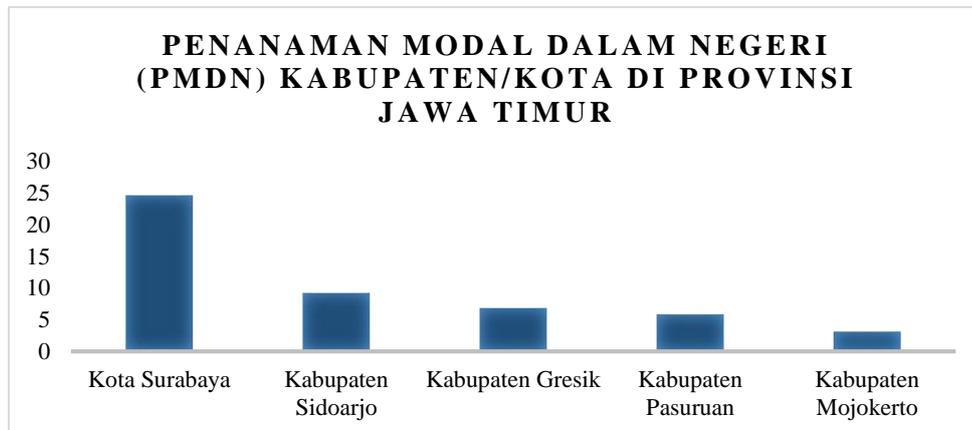
Gambar 1. 4 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Jawa Timur 2008-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Grafik diatas memperlihatkan PMDN Provinsi Jawa Timur yang terlihat fluktuatif. Terjadi peningkatan pada rentang tahun 2008-2010, lalu pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 26,1 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan sampai 55,7 triliun rupiah. Penurunan terjadi kembali pada tahun 2021 sebesar 6% sehingga total PMDN menjadi 52,6 triliun rupiah. Hal ini menjadi dampak pandemi *Covid-19* yang merubah tatanan perekonomian dan berdampak kepada PMDN di Provinsi Jawa Timur. Setelah perekonomian menjadi stabil di tahun 2022, PMDN di Provinsi Jawa Timur kembali naik 24% atau sebesar 65,4 triliun rupiah. Terdapat beberapa wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran dari PMDN terbanyak di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022, sebagai berikut.

Gambar 1. 5 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022



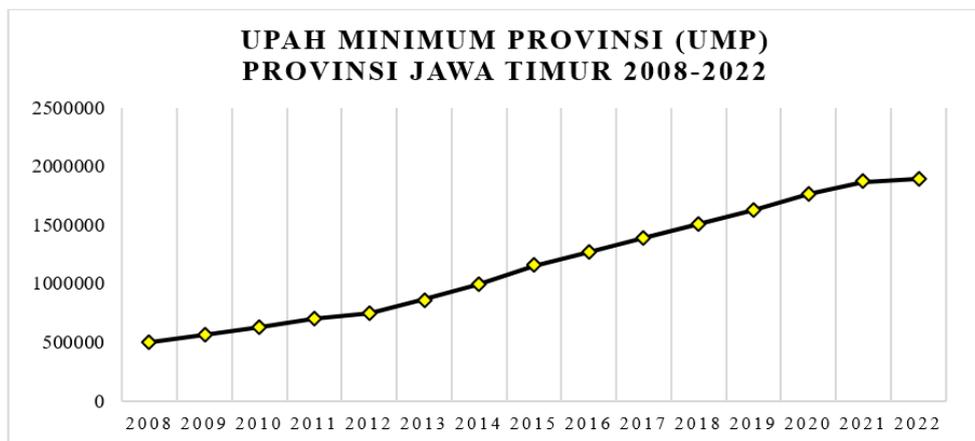
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Dari grafik diatas menunjukkan beberapa wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran dari PMDN seperti Kota Surabaya sebesar 24,6 triliun rupiah, Kabupaten Sidoarjo sebesar 9,2 triliun rupiah, Kabupaten Gresik sebesar 6,8 triliun rupiah, Kabupaten Pasuruan sebesar 5,8 triliun rupiah, dan Kabupaten Mojokerto sebesar 3,1 triliun rupiah. Hal tersebut mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur didorong oleh adanya investasi dalam negeri.

Masalah kemiskinan dapat dipicu oleh kualitas individu yang tidak seimbang. Rendahnya kualitas tersebut berdampak penurunan produktivitas, dan mempengaruhi tingkat upah pekerja (Islami & Anis, 2019). Menurut Todaro & Smith (2014), penetapan jumlah upah minimum guna meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Meningkatnya upah membuat konsumsi masyarakat akan naik sehingga akan merangsang semangat kerja dan menurunkan kemiskinan. Untuk menanggulangi adanya peningkatan upah yang berlebihan, pemerintah menetapkan adanya upah minimum.

Upah minimum merupakan standar paling kecil yang diberikan atas dasar balas jasa pekerja dalam lingkungan kerja (Putri & Putri, 2021). Upah minimum memiliki jumlah yang berbeda di setiap daerah. Berdasarkan PP No. 8/1981, upah minimum dibagi menurut regional, sub sektoral, dan sektoral regional. Penetapan upah minimum digunakan pemerintah sebagai taraf terendah seorang pengusaha dalam memberikan gaji kepada pekerja sesuai dengan taraf hidup di wilayah tersebut dan diharapkan pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga menjauhkannya dari jurang kemiskinan (Wiadnyana & Hadiyati, 2023). Berikut adalah perkembangan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Jawa Timur.

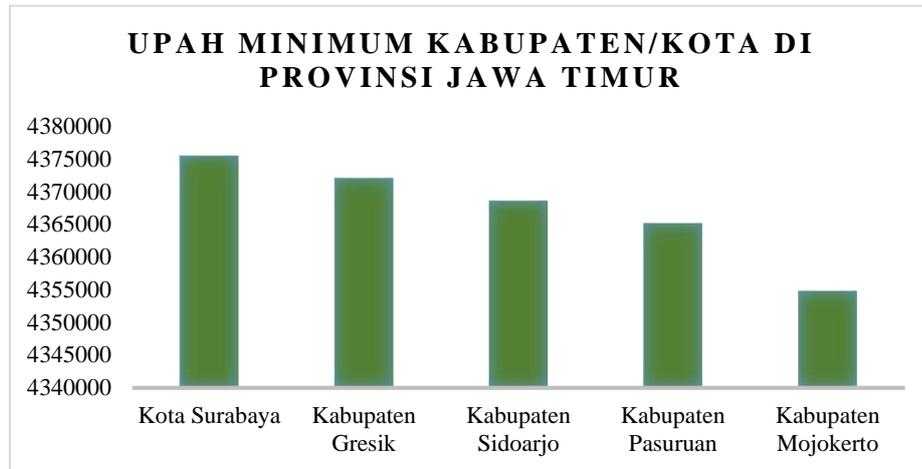
Gambar 1. 6 Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Jawa Timur 2008-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Grafik diatas memperlihatkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur terlihat relatif naik dalam rentang tahun 2008-2022. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2013, dari sebelumnya sebesar 745 ribu rupiah menjadi 866,25 ribu rupiah. Terdapat beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki penetapan upah minimum tertinggi pada tahun 2022, sebagai berikut.

Gambar 1. 7 Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Dari grafik diatas menunjukkan upah minimum tertinggi di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur adalah Kota Surabaya sebesar 4.375,4 ribu rupiah, Kabupaten Gresik sebesar 4.372 ribu rupiah, Kabupaten Sidoarjo sebesar 4.368,58 ribu rupiah, Kabupaten Pasuruan sebesar 4.365,13 ribu rupiah, dan Kabupaten Mojokerto sebesar 4.354,78 ribu rupiah. Peningkatan upah di setiap wilayah membuat pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan probabilitas pekerja untuk keluar dari garis kemiskinan.

Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan secara desentralisasi, sehingga pemerintah daerah berwenang atas daerahnya masing-masing. Kemandirian fiskal setiap daerah mengacu pada kemandirian pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan melalui pajak daerah, retribusi, dan sumber daya alam (Risdiyanto dkk., 2023). Salah satu tugas dari pemerintah daerah adalah mengurangi kemiskinan di daerahnya melalui program-program pemerintah. Program pengentasan masalah ini seharusnya menjadi program yang produktif dan

adanya bantuan modal sebagai upaya peningkatan pendapatan kelompok penduduk miskin dengan pendampingan yang intensif (Yustika, 2006). Dalam menjalankan program-program tersebut, pemerintah juga perlu adanya anggaran belanja daerah yang digunakan untuk pendanaan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program-program lainnya dalam upaya mengurangi jumlah kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah dapat diukur melalui belanja daerah menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja daerah secara langsung berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi dan sosial yang diharapkan dapat mengurangi kemiskinan (Zahari, 2017). Semakin meningkat belanja daerah yang digunakan maka kegiatan ekonomi suatu wilayah tersebut juga meningkat (Khamilah, 2019). Menurut BPS, realisasi belanja daerah di Provinsi Jawa Timur mencapai 94,02% sebesar 31,5 triliun rupiah. Pada tahun 2022, realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Timur juga masuk dalam 10 provinsi dengan realisasi belanja daerah terbesar di Indonesia. Berikut adalah perkembangan belanja daerah di Provinsi Jawa Timur.

Gambar 1. 8 Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur 2008-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Ditinjau dari grafik diatas, perkembangan belanja daerah dalam rentang tahun 2008-2020 terlihat tren peningkatan. Peningkatan terbanyak di tahun 2010 sebesar 10,21 triliun rupiah. Terjadi peningkatan belanja daerah di tahun-tahun selanjutnya. Selanjutnya tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 4,9% sehingga total belanja daerah menjadi 32,3 triliun rupiah. Pada tahun 2022 terjadi penurunan kembali sehingga total belanja daerah menjadi 31,5 triliun rupiah. Berikut adalah beberapa Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan realisasi belanja daerah terbanyak pada tahun 2022.

Gambar 1. 9 Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa Kota Surabaya menjadi wilayah dengan realiasi belanja daerah terbesar di Provinsi Jawa Timur mencapai 8,03 triliun rupiah. Selanjutnya diikuti dengan realisasi belanja daerah di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Malang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah di wilayah tersebut memiliki banyak program untuk membangun kota sehingga pertumbuhan prasarana ekonomi dan sosial menjadi lebih baik dan dapat menunjang kegiatan perekonomian masyarakat.

Sesuai dengan teori dari Ragnar Nurkse menyebutkan adanya fenomena lingkaran setan kemiskinan yang menyelimuti masyarakat miskin. Dalam Kuncoro (2010) menjelaskan bahwa teori lingkaran kemiskinan dimulai dari produktivitas yang rendah disebabkan oleh keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, serta aset yang terbatas. Rendahnya produktivitas berimplikasi pada rendahnya tingkat upah. Upah yang rendah akan membuat pekerja tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehingga dapat dikatakan sebagai penduduk miskin. Lalu dalam teori ini juga dijelaskan bahwa penyebab kemiskinan salah satunya melalui keterbatasan modal. Modal yang terbatas akan menghambat kreativitas masyarakat, sehingga akan membuat lapangan pekerjaan akan berkurang dan tidak cukup menampung banyaknya pekerja yang terus bertambah sehingga akan meningkatkan jumlah kemiskinan.

Dari teori diatas, rendahnya pendapatan akan berdampak pada rendahnya kesehatan, nutrisi, dan pendidikan sehingga akan memicu penurunan produktivitas ekonomi. Dampak yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan perekonomian (Todaro & Smith, 2011). Masalah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur berbanding terbalik dengan kondisi perekonomiannya. Menurut BPS, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 Provinsi Jawa Timur sebesar 5,34%. Angka tersebut membuat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur berada diatas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu sebesar 5,31%. Dalam menekan angka kemiskinan bukan hanya melalui perkembangan ekonomi yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur, namun diperlukan faktor pendukung ekonomi lainnya.

Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi terbesar ketiga sebagai penerima PMDN. Sejalan dengan penelitian Wiganepdo & Soegoto (2022), PMDN memiliki hubungan negatif dengan angka kemiskinan. Selain itu, setiap tahunnya upah minimum relatif meningkat sehingga mengindikasikan bahwa pemerintah juga berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut melalui pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat sehingga akan berdampak pada penurunan kemiskinan. Dalam penelitian Faadihilah & Priamadha (2023) menjelaskan adanya hubungan negatif antara upah minimum dan tingkat kemiskinan. Pemerintah juga mengurangi kemiskinan melalui adanya program-program dan bantuan yang terlihat dari belanja daerah. Pada tahun 2022, realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Timur sebesar 94,02% dan anggaran sebesar 31,5 triliun rupiah. Hal ini membuat Provinsi Jawa Timur berada di urutan ke-10 dengan realisasi belanja daerah terbanyak. Semakin besar belanja daerah yang digunakan, berarti program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah juga meningkat (Suparmoko, 2016). Hal ini dibuktikan dengan penelitian dari Akbar & Priana (2023) yang menjelaskan hubungan berbanding terbalik antara belanja daerah terhadap kemiskinan.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, pokok pembahasan utama mengenai permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Dalam mengentaskan fenomena ini, penulis ingin analisis lebih lanjut tentang dampak PMDN, upah minimum, dan belanja daerah yang menjadi faktor penting dalam penurunan angka kemiskinan. Maka penulis akan mengambil penelitian berjudul “Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Upah Minimum, dan Belanja Daerah Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas mempresentasikan beberapa persoalan sehingga dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah ada pengaruh antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur ?
2. Apakah ada pengaruh antara upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur ?
3. Apakah ada pengaruh antara belanja daerah terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian yang akan didapatkan, meliputi.

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara belanja daerah terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Keterbatasan kemampuan peneliti sehingga memuat batasan masalah objek yang diteliti, sehingga lebih terfokus terhadap topik yang dibahas. Penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan terfokus pada PMDN, upah minimum, dan

belanja daerah terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur dalam periode 2008-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian meliputi.

- a. Bagi peneliti, skripsi ini sebagai tugas akhir dalam menuntaskan studi sarjana Program Studi Ekonomi Pembangunan dan menjadi implementasi ilmu yang telah didapatkan selama ini.
- b. Bagi universitas, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian yang sejenis.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan informasi seluruh pihak dan menjadi acuan yang berhubungan dengan penelitian serupa di bidang ekonomi dan lainnya.